



PEMKAB. LUWU TIMUR

PERJANJIAN KINERJA
PERUBAHAN

ESELON II, III DAN IV

TAHUN 2024

BADAN PENDAPATAN DAERAH



PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2024
Nomor : 001/PK-PERUBAHAN/BAPENDA/2024

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : MUHAMMAD SAID,SE.MM

Jabatan : KEPALA BADAN PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN LUWU TIMUR
selanjutnya disebut Pihak Pertama

Nama : Dr. JAYADI NAS, S.Sos.,M.Si

Jabatan : Pjs. BUPATI LUWU TIMUR

selaku atasan Pihak Pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Malili, 1 Oktober 2024

Pihak Kedua,
Pjs. BUPATI LUWU TIMUR,

Pihak Pertama,
KEPALA BADAN,

Dr. JAYADI NAS, S.Sos., M.Si

MUHAMMAD SAID,SE.MM

PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2024
TINGKAT SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

No (1)	Sasaran Strategis (2)	Indikator Kinerja (3)	Target (4)
1	Meningkatnya penerimaan pendapatan daerah	Persentase peningkatan penerimaan pendapatan daerah	100,20 %
		Persentase peningkatan penerimaan Pendapatan Asli Daerah	26,07 %
2	Meningkatnya kualitas dan pencapaian kinerja penyelenggaraan urusan perangkat daerah	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	71,25 %

No	Nama Program	Anggaran (Rp)
1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	19.896.015.764,00
2	Program Pengelolaan Pendapatan Daerah	3.861.629.286,00
JUMLAH		23.757.645.051,00

Malili, 1 Oktober 2024

Pihak Kedua,
Pjs. BUPATI LUWU TIMUR,



Dr. JAYADI NAS, S.Sos., M.Si

Pihak Pertama,
KEPALA BADAN,



MUHAMMAD SAID, SE.MM

LAMPIRAN 2 PERJANJIAN KINERJA
BADAN PENDAPATAN DAERAH
PENJELASAN KINERJA TAHUN 2024

Penjelasan Kinerja 1.

Uraian Sasaran

Yang dimaksud dalam sasaran kinerja ini adalah Meningkatnya Penerimaan Pendapatan Daerah yang merujuk pada situasi dimana pendapatan yang diperoleh dari berbagai sumber meningkat dari waktu ke waktu. Pendapatan daerah dapat berasal dari berbagai sumber antara lain : Pendapatan Asli Daerah, Pendapatan Transfer, Lain – Lain Pendapatan Yang Sah. Dengan meningkatnya penerimaan pendapatan daerah, pemerintah daerah memiliki lebih banyak sumber daya untuk membiayai berbagai program dan layanan publik, serta untuk mendukung pembangunan dan pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan.

Dasar hukum dalam mencapai kinerja antara lain Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur nomor 11 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah 2021 – 2026 Kabupaten luwu Timur dan Peraturan Bupati Luwu Timur nomor 48 Tahun 2021 Tentang Rencana Strategi Perangkat Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun Anggaran 2021 – 2026.

Indikator Kinerja:

Sasaran Kinerja ini memiliki 2 (dua) indikator yaitu:

1. Persentase Penerimaan Pendapatan Daerah

Indikator kinerja ini yang akan menggambarkan secara langsung ketercapaian/kondisi sasaran kinerja yang akan diwujudkan, antara lain:

No	Uraian	Relevansi	Formulasi	Sumber data
1.	Indikator Persentase Penerimaan Pendapatan Daerah ditetapkan sebagai indikator kinerja dianggap merupakan salah satu indikator yang relevan dan dapat diukur	Nilai Persentase Penerimaan Pendapatan Daerah ditetapkan sebagai indikator kinerja karena dianggap selaras atau dapat memberikan gambaran tentang kemandirian finansial dan diversifikasi sumber pendapatan suatu daerah	Realisasi Pendapatan Daerah dibagi dengan target pendapatan daerah dikalikan seratus	Laporan Realisasi Penerimaan Pendapatan Daerah dari Bidang

Target Kinerja:

Dalam perjanjian kinerja ini, setiap indikator kinerja telah ditetapkan besaran target kinerja yang akan dicapai dengan penjelasan sebagai berikut:

Indikator Kinerja	Target	Penjelasan
Persentase Penerimaan Pendapatan Daerah	100,20 %	Target tersebut ditetapkan berdasarkan realisasi tahun sebelumnya karena realisasi sudah melampaui target Renstra

2. Persentase PAD terhadap Pendapatan Daerah

Indikator kinerja ini yang akan menggambarkan secara langsung ketercapaian/kondisi sasaran kinerja yang akan diwujudkan, antara lain:

No	Uraian	Relevansi	Formulasi	Sumber data
1.	Indikator Persentase PAD terhadap Pendapatan Daerah ditetapkan sebagai indikator kinerja dianggap merupakan salah satu indikator yang relevan dan dapat diukur	Nilai Persentase PAD terhadap Pendapatan Daerah ditetapkan sebagai indikator kinerja karena dianggap selaras atau dapat memberikan gambaran tentang seberapa besar kontribusi PAD dalam membiayai pengeluaran dan pembangunan serta seberapa mandiri keuangan daerah dari sumber pendapatan lokal, semakin tinggi persentase ini semakin besar kemandirian finansial daerah	Realisasi Pendapatan Asli Daerah dibagi dengan realisasi pendapatan daerah dikalikan seratus	Laporan Realisasi Penerimaan Pendapatan Asli Daerah dari Bidang

Target Kinerja:

Dalam perjanjian kinerja ini, setiap indikator kinerja telah ditetapkan besaran target kinerja yang akan dicapai dengan penjelasan sebagai berikut:

Indikator Kinerja	Target	Penjelasan
Persentase PAD terhadap Pendapatan Daerah	26,07 %	Target tersebut ditetapkan berdasarkan target Renstra.

Penjelasan Kinerja 2

Uraian Sasaran 2

Sasaran kedua pada Badan Pendapatan Daerah yaitu Meningkatnya kualitas dan pencapaian kinerja penyelenggaraan urusan perangkat daerah. Yang dimaksud dalam sasaran kinerja ini adalah peningkatan kualitas pada pencapaian kinerja yang diselenggarakan oleh masing-masing perangkat daerah. Pencapaian kinerja itu sendiri merupakan suatu proses yang dilakukan untuk dapat menghasilkan kinerja yang baik dan berkualitas sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan.

Dasar hukum dalam mencapai sasaran kinerja ini yaitu:

- Peraturan Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi No. 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Review Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah
- Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah
- Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 11 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah 2021-2026 Kabupaten Luwu Timur
- Peraturan Bupati Luwu Timur Nomor 48 Tahun 2021 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun Anggaran 2021 – 2026

Pengukuran kinerja digunakan sebagai dasar untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan dalam rangka mewujudkan visi dan misi instansi Pemerintah. Oleh karena itu pengukuran kinerja perlu didukung dengan ketersediaan data kinerja.

Indikator Kinerja

Sasaran kinerja sasaran ini memiliki 1 (satu) indikator kinerja yaitu:

1. Nilai SAKIP Perangkat Daerah

Indikator kinerja ini yang menggambarkan secara langsung ketercapaian/ kondisi sasaran kinerja yang akan diwujudkan, antara lain:

No	Uraian	Relevansi	Formulasi	Sumber Data
1	Nilai SAKIP Perangkat Daerah SAKIP adalah rangkaian sistematis dari berbagai aktivitas, alat, dan prosedur yang dirancang untuk tujuan penetapan dan pengukuran, pengumpulan data, pengklasifikasi, pengikhtisaran, dan pelaporan kinerja pada instansi pemerintah, dalam rangka pertanggungjawaban dan peningkatan kinerja instansi pemerintah	Penilaian akuntabilitas merupakan salah satu strategi yang dilaksanakan dalam rangka mempercepat pelaksanaan Reformasi Birokrasi, untuk mewujudkan pemerintahan yang bersih dan akuntabel, pemerintahan yang kapabel, serta meningkatnya kualitas pelayanan kepada masyarakat. Pelaksanaan evaluasi AKIP secara umum bertujuan untuk mengetahui sejauh mana AKIP dilaksanakan dalam mendorong peningkatan pencapaian kinerja yang tepat sasaran dan berorientasi hasil pada Instansi Pemerintah.	Nilai hasil akhir dari penjumlahan komponen-komponen evaluasi AKIP	Hasil evaluasi internal AKIP Inspektorat

Target Kinerja

Dalam perjanjian kinerja ini, setiap indikator kinerja telah ditetapkan besaran target kinerja yang akan dicapai dengan penjelasan sebagai berikut:

Indikator Kinerja	Target	Penjelasan
Nilai SAKIP Perangkat Daerah	71,25	Target yang ditetapkan berdasarkan pada hasil evaluasi atas akuntabilitas kinerja Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2023 oleh Inspektorat Kabupaten yaitu 71,10 (BB) yang mana telah melampaui target akhir Renstra 2021-2026, sehingga Badan Pendapatan Daerah mengacu pada realisasi Tahun 2023. Berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, maka ditetapkan target untuk tahun 2024 sebesar 71,25 (Nilai) Angka tersebut termasuk dalam kategori BB dengan nilai (>70 – 80).

Kepala Badan,


MUHAMMAD SAID, SE,MM
NIP. 19790113 200502 1 010



PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2024

Nomor : 002/PK-PERUBAHAN/BAPENDA/2024

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Marlina, SE

Jabatan : Sekretaris Badan Pendapatan Daerah

selanjutnya disebut Pihak Pertama

Nama : Muhammad Said, SE,MM

Jabatan : Kepala Badan Pendapatan Daerah

selaku atasan Pihak Pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan, keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Malili, 1 Oktober 2024

Pihak Kedua,
Kepala Badan

MUHAMMAD SAID, SE.MM
Nip. 19790313 200502 1 010

Pihak Pertama,
Sekretaris

MARLINA, SE
Nip. 19730310 200312 2 005

PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2024
BADAN PENDAPATAN DAERAH

NO	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Kualitas Perencanaan Organisasi Perangkat Daerah	Persentase Penyusunan Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Tepat Waktu	100%
2.	Tertib Administrasi Keuangan	Persentase Administrasi Keuangan yang Terselenggara dengan Baik	100%
3.	Kualitas Pengelolaan Asset	Persentase Barang Milik Daerah yang Diadministrasikan Sesuai Standar	100%
4.	Kualitas Sumber Daya Manusia Organisasi Perangkat Daerah dengan Rata – Rata Capaian Kinerja	Persentase Rata-Rata Capaian Kinerja Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	100%
5.	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Perangkat Daerah	Persentase Rata-Rata Capaian Kinerja Administrasi Umum Perangkat Daerah	100%
6.	Tersedianya Barang milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan	Persentase Barang Milik Daerah Perangkat Daerah yang Terpenuhi	100%
7.	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Organisasi Perangkat Daerah	Persentase Rata – Rata Capaian Kinerja Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 %
8.	Kualitas Pemeliharaan Aset	Persentase Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Yang Terpelihara dengan Baik	100 %

Kegiatan	Anggaran
1. Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Rp. 91.502.694,-
2. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Rp. 13.999.927.611,-
3. Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Rp. 14.512.470,-
4. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Rp. 449.255.375,-
5. Administrasi Umum Perangkat Daerah	Rp. 933.315.730,-
6. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Rp. 3.924.195.014,-
7. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Rp. 295.526.870,-
8. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Rp. 190.780.000,-

Malili, 1 Oktober 2024

Kepala Badan,

Sekretaris,



MUHAMMAD SAID, SE.MM
Nip. 19790313 200502 1 010



MARLINA, SE
Nip. 19730310 200312 2 005



PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2024

Nomor : 003/PK-PERUBAHAN/BAPENDA/2024

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Chaeruddin Arfah M, S.IP, MM

Jabatan : Kepala Bidang Perencanaan dan Pengembangan Pendapatan Daerah
selanjutnya disebut Pihak Pertama

Nama : Muhammad Said, SE.MM

Jabatan : Kepala Badan Pendapatan Daerah
selaku atasan Pihak Pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan, keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Malili, 1 Oktober 2024

Pihak Kedua,
Kepala Bapenda

MUHAMMAD SAID, SE.MM
Nip. 19790313 200502 1 010

Pihak Pertama,
Kepala Bidang Perencanaan dan
Pengembangan Pendapatan
Daerah

CHAERUDDIN ARFAH M, S.IP, MM
Nip.19790206 201001 1 009

PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2024
BADAN PENDAPATAN DAERAH

NO	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Tercapainya potensi PAD yang optimal	Persentase realisasi potensi PAD Non PBB dan BPHTB terhadap potensi PAD yang teridentifikasi Non PBB dan BPHTB	100 %

Kegiatan

1. Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah

Anggaran

Rp.1.123.044.710,-

Malili, 1 Oktober 2024

Pihak Kedua,
Kepala Bapenda

Pihak Pertama,
Kepala Bidang Perencanaan dan
Pengembangan Pendapatan
Daerah


MUHAMMAD SAID, SE.MM
Nip. 19790313 200502 1 010


CHAERUDDIN ARFAH M, S.IP, MM
Nip.19790206 201001 1 009



PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2024

Nomor : 004/PK-PERUBAHAN/BAPENDA/2024

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Herawati Rijal, SE

Jabatan : Kepala Bidang Pengelolaan Pendapatan Daerah

selanjutnya disebut Pihak Pertama

Nama : Muhammad Said, SE.MM

Jabatan : Kepala Badan Pendapatan Daerah

selaku atasan Pihak Pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan, keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Malili, 1 Oktober 2024

Pihak Kedua,
Kepala Bapenda

MUHAMMAD SAID, SE.MM
Nip.19790313 200502 1 010

Pihak Pertama,
Kepala Bidang Pengelolaan
Pendapatan Daerah

HERAWATI RIJAL, SE
Nip.19851115 201001 2 027

PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2024
BADAN PENDAPATAN DAERAH

NO	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Tercapainya penerimaan PAD non PBB dan BPHTB	Persentase realisasi PAD non PBB dan BPHTB terhadap target PAD non PBB dan BPHTB	100 %

Kegiatan

1. Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah

Anggaran

Rp. 1.117.825.500,.

Malili, 1 Oktober 2024

Pihak Kedua,
Kepala Bapenda



MUHAMMAD SAID, SE.MM
Nip.19790313 200502 1 010

Pihak Pertama,
Kepala Bidang Pengelolaan
Pendapatan Daerah



HERAWATI RIJAL, SE
Nip.19851115 201001 2 027



PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2024

Nomor :005/PK-PERUBAHAN/BAPENDA/2024

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Suparman, SAP

Jabatan : Kepala Bidang PBB-P2 dan BPHTB

selanjutnya disebut Pihak Pertama

Nama : Muhammad Said, SE.MM

Jabatan : Kepala Badan Pendapatan Daerah

selaku atasan Pihak Pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan, keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Malili, 1 Oktober 2024

Pihak Kedua,
Kepala Bapenda

Pihak Pertama,
Kepala Bidang PBB-P2 dan
BPHTB

MUHAMMAD SAID, SE.MM
Nip.19790313 200502 1 010

SUPARMAN, SAP
Nip.19780602 200312 1 006

PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2024
BADAN PENDAPATAN DAERAH

NO	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Tercapainya penerimaan PBB dan BPHTB	Persentase realisasi PBB dan BPHTB terhadap target PAD PBB dan BPHTB	100 %

Kegiatan

1. Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah

Anggaran

Rp. 1.117.825.500.,

Malili, 1 Oktober 2024

Pihak Kedua,
Kepala Bapenda

Pihak Pertama,
Kepala Bidang PBB-P2 dan
BPHTB


MUHAMMAD SAID, SE.MM
Nip.19790313 200502 1 010


SUPARMAN, SAP
Nip.19780602 200312 1 006



PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2024

Nomor : 006/PK-PERUBAHAN/BAPENDA/2024

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Irmawati. M, ST

Jabatan : Kasubag Perencanaan dan Keuangan

selanjutnya disebut Pihak Pertama

Nama : Marlina, SE

Jabatan : Sekretaris Bapenda

selaku atasan Pihak Pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan, keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Malili, 1 Oktober 2024

Pihak Kedua,
Sekretaris Bapenda

MARLINA, SE

Nip. 19730310 200312 2 005

Pihak Pertama,
Kasubag Perencanaan dan Keuangan

IRMAWATI. M, ST

Nip. 19771126 200604 2 016

PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2024
BADAN PENDAPATAN DAERAH

NO	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Tersusunnya dokumen RKA-SKPD	Jumlah dokumen RKA- SKPD dan yang disusun tepat waktu	2 Dokumen
2.	Tersusunnya dokumen DPA-SKPD	Jumlah dokumen DPA- SKPD yang disusun tepat waktu	2 Dokumen
3.	Tersusunnya laporan kinerja perangkat daerah	Jumlah laporan evaluasi kinerja perangkat daerah yang disusun	10 Laporan
4.	Tersusunnya dokumen perencanaan	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2 Dokumen
5.	Terlaksananya Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah dokumen penatausahaan dan pengujian/verifikasi keuangan SKPD	12 Dokumen
6.	Terlaksananya penyusunan laporan keuangan perangkat daerah	Jumlah laporan keuangan bulanan/triwulanan/semesteran SKPD dan laporan koordinasi penyusunan laporan keuangan bulanan/triwulanan/semesteran SKPD	19 Laporan
7.	Terbayarnya gaji dan tunjangan ASN	Jumlah orang yang menerima gaji dan tunjangan ASN	29 Orang

Sub Kegiatan

Anggaran

1. Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Rp. 2.861.470,-
2. Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Rp. 2.806.614,-
3. Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Rp. 10.544.520,-
4. Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Rp. 75.290.090,-
5. Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/ Verifikasi Keuangan SKPD	Rp. 19.458.855,-
6. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Rp. 146.491.480,-
7. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Rp. 13.833.977.276,-

Malili, 1 Oktober 2024

Pihak Kedua,
Sekretaris Bapenda



MARLINA, SE

Nip. 19730310 200312 2 005

Pihak Pertama,
Kasubag Perencanaan dan Keuangan



IRMAWATI, M, ST

Nip. 19771126 200604 2 016



PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2024

Nomor : 007/PK-PERUBAHAN/BAPENDA/2024

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Salbaiti, S.AN

Jabatan : Kasubag Umum dan Kepegawaian

selanjutnya disebut Pihak Pertama

Nama : Marlina, SE

Jabatan : Sekretaris Bapenda

selaku atasan Pihak Pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan, keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Malili, 1 Oktober 2024

Pihak Kedua,
Sekretaris Bapenda

MARLINA, SE

Nip.19730310 200312 2 005

Pihak Pertama,
Kasubag Umum dan Kepegawaian

SALBAITI, S.AN

Nip. 19810329 201001 2 019

PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2024
BADAN PENDAPATAN DAERAH

NO	SASARAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Tersusunnya laporan penatausahaan barang milik daerah SKPD	Jumlah laporan penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD yang disusun	4 Laporan
2	Termutakhirnya laporan data administrasi kepegawaian	Jumlah dokumen pendataan dan pengolahan administrasi kepegawaian	12 Dokumen
3	Terlaksananya sosialisasi peraturan perundang-undangan	Jumlah orang yang mengikuti sosialisasi peraturan perundang-undangan	450 Orang
4	Meningkatnya pengetahuan dan keterampilan aparatur sipil negara	Jumlah orang yang mengikuti bimbingan teknis implementasi peraturan perundang - undangan	29 Orang
5	Tersedianya komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang optimal	Jumlah paket komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan	5 Paket
6	Tersedianya peralatan dan perlengkapan kantor	Jumlah paket peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	2 Paket
7	Tersedianya bahan logistik kantor	Jumlah paket bahan logistik kantor yang disediakan	18 Paket
8	Tersedianya barang cetakan dan penggandaan	Jumlah paket Barang cetakan dan penggandaan yang disediakan	3 Paket
9	Tersedianya bacaan dan peraturan perundang-undangan	Jumlah dokumen bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan yang disediakan	36 Dokumen
10	Tersedianya makan minum tamu	Jumlah laporan fasilitasi kunjungan tamu	4 Laporan
11	Terselenggaranya rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	Jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	160 Laporan
12	Terlaksananya pengadaan mebel	Jumlah paket mebel yang disediakan	39 Unit
13	Terlaksananya pengadaan peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah unit peralatan dan Mesin Lainnya yang disediakan	48 Unit

NO	SASARAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET
14	Terlaksananya pengadaan sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya	Jumlah unit sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya yang disediakan	2 Unit
15	Terlaksananya administrasi surat masuk dan keluar	Jumlah laporan penyediaan jasa surat menyurat	12 Laporan
16	Terbayarnya jasa komunikasi , sumber daya air dan listrik	Jumlah laporan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang disediakan	12 Laporan
17	Terbayarnya jasa tenaga pelayanan umum kantor	Jumlah laporan penyediaan jasa pelayanan umum kantor yang disediakan	12 Laporan
18	Terlaksananya pemeliharaan kendaraan dinas operasional atau lapangan	Jumlah kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan yang dipelihara dan dibayarkan pajaknya	8 Unit
19	Terlaksananya pemeliharaan peralatan dan mesin	Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara	34 Unit
20	Terlaksananya pemeliharaan/Rehabilitasi gedung kantor dan bangunan lainnya	Jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	1 Unit

Sub Kegiatan	Anggaran
1. Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Rp. 14.512.470,-
2. Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Rp. 46.569.215,-
3. Sosialisasi Peraturan Peundang- Undangan	Rp. 21.576.160,-
4. Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Rp. 381.110.000,-
5. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Rp. 7.300.000,-
6. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Rp. 2.000.000,-
7. Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Rp. 7.905.570,-
8. Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Rp. 170.349.360,-
9. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang Undangan	Rp. 6.840.000,-
10. Fasilitas Kunjungan Tamu	Rp. 11. 250.000,-
11. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Rp. 727.670.800,-

12. Pengadaan Mebel	Rp.	26.400.000,-
13. Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Rp	3.095.800.000,-
14. Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Rp.	801.995.014,-
15. Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Rp.	23.690.870,-
16. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Rp.	228.036.000,-
17. Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Rp.	40.800.000,-
18. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas Atau Kendaraan Dinas Jabatan	Rp.	54.920.000,-
19. Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Rp.	64.860.000,-
20. Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Rp.	71.000.000,-

Malili, 1 Oktober 2024

Pihak Kedua,
Sekretaris Bapenda



MARLINA, SE

Nip.19730310 200312 2 005

Pihak Pertama,
Kasubag Umum dan Kepegawaian



SALBAITI, S.AN

Nip.19810329 201001 2 019



PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2024

Nomor : 008/PK-PERUBAHAN/BAPENDA/2024

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Ekawati, S.AN

Jabatan : Kasubid. Perencanaan dan Pengembangan Potensi Pendapatan Daerah selanjutnya disebut Pihak Pertama

Nama : Chaeruddin Arfah M, S.IP, MM

Jabatan : Kepala Bidang Perencanaan dan Pengembangan Pendapatan Daerah selaku atasan Pihak Pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan, keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Malili, 1 Oktober 2024

Pihak Kedua,
Kepala Bidang Perencanaan dan
Pengembangan Potensi

CHAERUDDIN ARFAH M, S.IP, MM
Nip.19790206 201001 1 009

Pihak Pertama,
Kasubid. Perencanaan dan
Pengembangan Potensi
Pendapatan Daerah

EKAWATI, S.AN
Nip.19831201 200901 2 001

PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2024
BADAN PENDAPATAN DAERAH

NO	SASARAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Tersedianya dokumen perencanaan pengelolaan pendapatan	Jumlah dokumen rencana pengelolaan pajak daerah	4 Dokumen
2.	Tersedianya data pelaporan pajak daerah	Jumlah data pelaporan pajak daerah yang telah dilakukan penelitian dan verifikasi	12 Laporan

Sub Kegiatan

Anggaran

- | | |
|--|-------------------|
| 1. Perencanaan Pengelolaan Pajak Daerah | Rp. 170.544.190,- |
| 2. Penelitian dan Verifikasi Data Pelaporan Pajak Daerah | Rp. 120.372.530,- |

Malili, 1 Oktober 2024

Pihak Kedua,
Kepala Bidang Perencanaan dan
Pengembangan Pendapatan Daerah

CHAERUDDIN ARFAH M, S.IP, MM
Nip.19790206 201001 1 009

Pihak Pertama,
Kasubid. Perencanaan dan
Pengembangan Potensi
Pendapatan Daerah

EKAWATI, S.AN
Nip.19831201 200901 2 001



PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2024

Nomor : 009/PK-PERUBAHAN/BAPENDA/2024

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Rannu Lusinup Siampa, SE

Jabatan : Kasubid. Penyuluhan, Keberatan dan Regulasi Pendapatan Daerah
selanjutnya disebut Pihak Pertama

Nama : Chaeruddin Arfah M, S.IP, MM

Jabatan : Kepala Bidang Perencanaan dan Pengembangan Pendapatan Daerah
selaku atasan Pihak Pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan, keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Malili, 1 Oktober 2024

Pihak Kedua,
Kepala Bidang Perencanaan dan
Pengembangan Pendapatan Daerah

CHAERUDDIN ARFAH M, S.IP, MM
Nip.19790206 201001 1 009

Pihak Pertama,
Kasubid. Penyuluhan, Keberatan
dan Regulasi Pendapatan Daerah

RANNU LUSINUP SIAMPA, SE
Nip.19760715 200604 2 028

PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2024
BADAN PENDAPATAN DAERAH

NO	SASARAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Tersedianya hasil analisis pajak daerah serta pengembangan pajak daerah dan kebijakan pajak daerah	Jumlah dokumen hasil analisis pajak daerah serta pengembangan pajak daerah dan kebijakan pajak daerah	8 Dokumen
2.	Terlaksananya penyuluhan dan penyebarluasan kebijakan pajak daerah	Jumlah laporan pelaksanaan penyuluhan dan penyebarluasan kebijakan pajak daerah	12 Laporan
2.	Terfasilitasinya layanan dan konsultasi pajak daerah	Jumlah layanan dan konsultasi pajak daerah	24 Layanan

Sub Kegiatan

Anggaran

- | | |
|---|-------------------|
| 1. Analisa dan Pengembangan Pajak Daerah, serta Penyusunan Kebijakan Pajak Daerah | Rp. 501.898.510,- |
| 2. Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah | Rp. 278.509.640,- |
| 3. Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah | Rp. 51.719.840,- |

Malili, 1 Oktober 2024

Pihak Kedua,
Kepala Bidang Perencanaan dan
Pengembangan Pendapatan Daerah

CHAERUDDIN ARFAH M, S.IP, MM
Nip.19790206 201001 1 009

Pihak Pertama,
Kasubid. Penyuluhan, Keberatan
dan Regulasi Pendapatan Daerah

RANNU LUSINUP SIAMPA, SE
Nip.19760715 200604 2 028



PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2024

Nomor : 010/PK-PERUBAHAN/BAPENDA/2024

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Sasi Daniar, SE

Jabatan : Kasubid. Pendataan, Pendaftaran Pajak Daerah dan Retribusi Daerah
selanjutnya disebut Pihak Pertama

Nama : Herawati Rijal, SE

Jabatan : Kepala Bidang Pengelolaan Pendapatan Daerah
selaku atasan Pihak Pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan, keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Malili, 1 Oktober 2024

Pihak Kedua,
Kepala Bidang Pengelolaan
Pendapatan Daerah

HERAWATI RIJAL, SE
Nip.19851115 201001 2 027

Pihak Pertama,
Kasubid. Pendataan, Pendaftaran
Pendaftaran Pajak Daerah dan
Retribusi Daerah

SASI DANJAR, SE
Nip.19830130 201001 2 004

PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2024
BADAN PENDAPATAN DAERAH

NO	SASARAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Terlaksananya pendataan dan pendaftaran wajib pajak daerah (Non PBB dan BPHTB)	Jumlah laporan hasil pendataan dan pendaftaran objek wajib pajak daerah, subjek pajak dan wajib pajak daerah (Non PBB dan BPHTB)	12 Laporan
2.	Terlaksananya penetapan pajak daerah (Non PBB dan BPHTB)	Jumlah dokumen penetapan pajak daerah (Non PBB dan BPHTB)	145 Dokumen

Sub Kegiatan

1. Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah
2. Penetapan Wajib Pajak Daerah

Anggaran

Rp. 286.996.016,-
Rp. 682.668.830,-

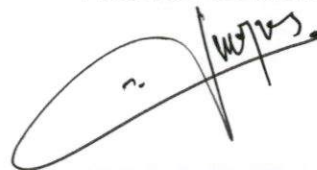
Malili, 1 Oktober 2024

Pihak Kedua,
Kepala Bidang Pengelolaan
Pendapatan Daerah



HERAWATI RIJAL, SE
Nip.19851115 201001 2 027

Pihak Pertama,
Kasubid. Pendataan, Pendaftaran
Pendaftaran Pajak Daerah dan
Retribusi Daerah



SASI DANJAR, SE
Nip.19830130 201001 2 004



PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2024

Nomor :011/PK-PERUBAHAN/BAPENDA/2024

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Gatotrianto. B, SE

Jabatan : Kasubid. Penagihan dan Pemeriksaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah

selanjutnya disebut Pihak Pertama

Nama : Herawati Rijal, SE

Jabatan : Kepala Bidang Pengelolaan Pendapatan Daerah

selaku atasan Pihak Pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan, keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Malili, 1 Oktober 2024

Pihak Kedua,
Kepala Bidang Pengelolaan
Pendapatan Daerah

HERAWATI RIJAL, SE

Nip. 19851115 201001 2 027

Pihak Pertama,
Kasubid. Penagihan dan
Pemeriksaan Pajak Daerah dan
Retribusi Daerah

GATOTRIANTO. B, SE

Nip. 19810504 201503 1 001

PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2024
BADAN PENDAPATAN DAERAH

NO	SASARAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Tercapainya penagihan pajak daerah (Non PBB dan BPHTB)	Jumlah dokumen hasil pelaksanaan penagihan pajak daerah (Non PBB dan BPHTB)	98 Dokumen

Sub Kegiatan

1. Penagihan Pajak Daerah

Anggaran

Rp. 651.094.230,-

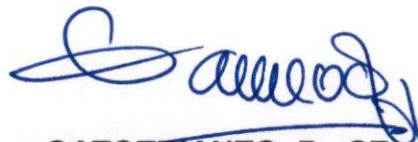
Malili, 1 Oktober 2024

Pihak Kedua,
Kepala Bidang Pengelolaan
Pendapatan Daerah



HERAWATI RIJAL, SE
Nip. 19851115 201001 2 027

Pihak Pertama,
Kasubid. Penagihan dan
Pemeriksaan Pajak Daerah dan
Retribusi Daerah



GATOTRIANTO. B. SE
Nip. 19810504 201503 1 001



PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2024

Nomor : 012/PK-PERUBAHAN/BAPENDA/2024

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Rahmadamayanti, S.S

Jabatan : Kasubid. Pelayanan, Pengelolaan Data dan Informasi

selanjutnya disebut Pihak Pertama

Nama : Suparman, SAP

Jabatan : Kepala Bidang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan dan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan

selaku atasan Pihak Pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan, keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Malili, 1 Oktober 2024

Pihak Kedua,
Kepala Bidang Pajak Bumi dan Bangunan
Perdesaan dan Perkotaan dan Bea Perolehan
Hak atas Tanah dan Bangunan

Pihak Pertama,
Kasubid. Pelayanan, Pengelolaan
Data dan Informasi


SUPARMAN, SAP

Nip.19780602 200312 1 006


RAHMADAMAYANTI, S.S
Nip. 19840809 201101 2 008

PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2024
BADAN PENDAPATAN DAERAH

NO	SASARAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Terlaksananya pelayanan, pengelolaan data objek pajak yang akan disesuaikan NJOP nya	Jumlah Objek pajak yang disesuaikan NJOP nya	120000 Objek Pajak

Sub Kegiatan

Anggaran

1. Penilaian Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2) serta Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)

Rp. 1.117.825.500,-

Malili, 1 Oktober 2024

Pihak Kedua,
Kepala Bidang Pajak Bumi dan Bangunan
Perdesaan dan Perkotaan dan Bea Perolehan
Hak atas Tanah dan Bangunan

Pihak Pertama,
Kasubid. Pelayanan, Pengelolaan
Data dan Informasi

SUPARMAN, SAP
Nip.19780602 200312 1 006


RAHMADAMAYANTI, S.S
Nip. 19840809 201101 2 008



PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2024

Nomor : 013/PK-PERUBAHAN/BAPENDA/2024

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Agus Abdullah, SE,M.Si

Jabatan : Kasubid. Penagihan dan Pemeriksaan

selanjutnya disebut Pihak Pertama

Nama : Suparman, SAP

Jabatan : Kepala Bidang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan dan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan

selaku atasan Pihak Pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan, keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Malili, 1 Oktober 2024

Pihak Kedua,
Kepala Bidang Pajak Bumi dan Bangunan
Perdesaan dan Perkotaan dan Bea Perolehan
Hak atas Tanah dan Bangunan

Pihak Pertama,
Kasubid. Penagihan dan
Pemeriksaan PBB dan
BPHTB

SUPARMAN, SAP

Nip.19780602 200312 1 006

AGUS ABDULLAH, SE.M.Si

Nip.19780828 201001 1 014

PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2024
BADAN PENDAPATAN DAERAH

NO	SASARAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Terlaksananya objek pajak yang disesuaikan NJOP nya	Jumlah objek pajak yang disesuaikan NJOP nya	120000 Objek Pajak

Sub Kegiatan

Anggaran

1. Penilaian Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2) serta Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)

Rp. 1.117.825.500,-

Malili, 1 Oktober 2024

Pihak Kedua,
Kepala Bidang Pajak Bumi dan Bangunan
Perdesaan dan Perkotaan dan Bea Perolehan
Hak atas Tanah dan Bangunan

Pihak Pertama,
Kasubid. Penagihan dan
Pemeriksaan PBB dan
BPHTB


SUPARMAN, SAP

Nip.19780602 200312 1 006


AGUS ABDULLAH, SE.M.Si

Nip.19780828 201001 1 014